

## Jurnalisme Patriotis: Solusi atau Kemunduran?!<sup>1</sup>

Oleh: Stanley

Upaya kalangan pers dan media elektronik untuk memrotas dan menolak kontrol oleh TNI dalam hal pemberitaan soal "Operasi Terpadu" di Aceh, secara resmi dijawab oleh kalangan TNI dan pemerintah dengan menyodorkan paradigma baru: jurnalisme patriotis. Apa sebenarnya jurnalisme patriotis itu? Apa bedanya dengan jurnalisme model "pers Pancasila" di masa lalu, atau "pers yang bebas tapi bertanggungjawab", atau "pers sistem komunikasi sambung rasa? Apa bedanya dengan model jurnalisme yang dulu sering diproduksi di jaman kepemimpinan Menpen Harmoko?

Di masa lalu (juga sampai sekarang) dengan mudah kekuasaan menuduh wartawan telah memelintir berita. Saat wartawan Sidney Morning Herald melaporkan bisnis keluarga Cendana, Harmoko segera melarang peredaran harian tersebut di Indonesia. Tak Cuma itu, Harmoko juga menuduh bahwa para wartawan asing di Jakarta mempraktekkan jurnalisme alkohol. Harmoko menuduh para wartawan asing tak menulis berdasar fakta tapi lebih banyak menulis berdasar *ngrumpi* sambil minum sampai mabuk di pub/café.

Kini, dengan alasan nasionalisme dan demi keutuhan NKRI tuduhan kembali dilancarkan kepada kalangan pers yang mencoba melakukan liputan berimbang (sesuai prinsip *cover both side* dan *balance of reporting*). Penguasa darurat militer Mayjen TNI Endang Suwarya meminta agar pers di Aceh tak menerbitkan berita yang membesarkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).<sup>2</sup> Antara lain dengan mewawancari jurubicara GAM. Tak lama kemudian Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif yang awalnya mengimbau agar masyarakat mengerti tentang pembatasan liputan yang kemungkinan akan diberlakukan di Aceh segera melontarkan istilah jurnalisme patriotis sebagai satu-satunya solusi. Pers diminta berpihak pada NKRI untuk menghadapi kelompok GAM. Sejak itu pula pers mengubah sebutan GAM menjadi Gerakan Separatis Aceh (GSA).

Apakah ini memang solusi bagi penyelesaian Aceh? Bagi pemerintah tampoaknya ini keputusan final yang tak dapat digugat. Untuk itulah media diminta terlibat untuk menjadi PR yang baik. Operasi militer yang dilihat secara telanjang mata oleh masyarakat secara perlahan diubah menjadi "operasi terpadu". Sejumlah kebijakan operasi dipoles dengan istilah yang lebih halus untuk menunjukkan bahwa operasi penumpasan GAM tak lain adalah operasi penegakan hukum dan pemulihan keamanan. Sejumlah kelompok pemuda atas nama nasionalisme, melakukan tekanan dan meneror aktivis ornop yang mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian Aceh.

Apa yang salah dengan media dan kerja jurnalis?

### Represi Jurnalis Vs Eforia Media

Ada banyak kalangan menyatakan bahwa pers kini berada dalam suasana kebebasan. Betulkah? Kita bisa mencatat bagaimana sejumlah wartawan dan fotografer dipukuli aparat militer secara membabi buta, bahkan ketika mereka telah menunjukkan kartu identitasnya sekali pun. Wartawan yang menunjukkan kartu pengenal mereka malah diteriaki aparat negara dengan kata-kata, "Wartawan anjing, wartawan anasionalis." Demikian pula kaum preman, milisi dan OKP secara perlahan kini telah menjadi musuh jurnalis, tanpa pernah bisa diadili oleh aparat hukum. Ada yang mengatakan, pasca reformasi kini tak ada lagi pers alternatif. Sebutan "alternatif" telah pudar bersamaan

---

<sup>1</sup> Dibuat untuk keperluan diskusi terfokus "Peran Media Dalam Status Darurat Militer" yang diselenggarakan ProPatria di Hotel Mulia, Jakarta, pada 10 Juni 2003.

<sup>2</sup> Lihat *Kompas*, 23 Mei 2003.

dengan bangkrutnya rejim Orde Baru. Semua pers kini berlomba-lomba menjadi alternatif. Baik isi, cara penyajian, angle maupun topik yang diangkat.

Orang berlomba-lomba membuat berbagai penerbitan.<sup>3</sup> Terutama yang berbentuk pers murah-meriah, yaitu tabloid. Orang yang datang ke kios majalah akan bingung memilih media yang akan dibelinya, karena pilihan terlalu banyak dan sama membingungkannya.. Semua berlomba membuat liputan yang paling keras. Seolah kian keras kian baik.

Hal tersebut membuat pers belakangan cenderung mengalami penurunan kualitas. Berbagai pelanggaran kaidah jurnalistik dibuat sebagai akses perlombaan unjuk keberanian yang tak sehat.

Ada yang mengatakan bahwa masyarakat kita saat ini ibarat primata yang baru dilepas penutup mulutnya setelah disekap berhari-hari. "Mereka berteriak-teriak seperti orang gila," ujar salah satu tokoh, "demikian juga dengan mediamassa. Lebih banyak yang berteriak ketimbang yang menulis."

Kenyataan ini belakangan kian memburuk dengan menurunnya minat baca masyarakat terhadap media. Pada era 1998 pembaca media massa di Indonesia mencapai angka sekitar 6 juta orang, tapi pada awal 2001 pembaca media di Indonesia merosot menjadi hanya sekitar 2 juta orang.<sup>4</sup>

Pernyataan media "alternatif" telah mati tak sepenuhnya benar, meski pada kenyataannya banyak pesaing baru bermunculan. Orang menganggap pengertian pers alternatif kini sebagai sebuah media kritis yang isinya tak bombastis, cuma memaki dan mengabaikan unsur akurasi. Kini, orang mengaitkan unsur "alternatif" dengan berita yang bisa dipercaya, sebuah *side information* ketimbang *main information* yang muncul ke permukaan. Mungkin karena itu lah kini jurnalisme investigatif mulai dikembangkan kembali di sejumlah mediamassa.

Ada banyak kalangan malah menyatakan pers di jaman industri media tak berbeda dengan gabungan produk pop art biasa, seni grafis dan hiburan ala Walt Disney. Tak lebih, tak kurang. Untuk itu, kita barangkali mesti memeriksa kembali fungsi sebuah media.

Banyak pengamat pers menyatakan, bahwa di Indonesia peran kontrol yang dijalankan pers sesungguhnya jauh lebih efektif dan efisien ketimbang yang dilakukan DPR. Sebab pers tak perlu terikat pada jadwal dan tatib persidangan. Lagi pula kontrol sosial itu bisa dilakukan setiap saat.

Meski badan dunia macam PBB telah mengakui pers dan ornop sebagai institusi negara yang ke empat, namun sebagaimana upaya menghormati kesepakatan antar bangsa ada banyak hal yang telah jadi kesepakatan ditolak mentah-mentah oleh negara berkembang. Antara lain Pasal 19 DUHAM dan "Declaration on the Mass Media" (disponsori Unesco pada 1978).

Pers sebagai salah satu pilar kehidupan bernegara tampaknya memang hanya menjadi "angan-angan", *das sein*. Sebab ada banyak negara yang anti-demokrasi mencoba menginterpretasikan kebebasan pers sesuai kepentingan kekuasaan.

---

<sup>3</sup>Pada awal Desember 1998 tercatat telah ada 469 pers resmi (terdaftar) di Indonesia. Kini (Juni 2003) angka mencapai sekitar 800 pers. Sebelumnya sempat mencapai angka yang mencengangkan yaitu 1.640 pers saat menjelang pelaksanaan Pemilu. Tentu saja ini membingungkan sebab perlombaan justru terjadi saat ekonomi mengalami krisis dan semua *overhead* operasional keredaksian meningkat sekitar 300% lebih. Ada banyak analisis berspekulasi bahwa maraknya berbagai penerbitan baru merupakan bagian dari bermunculannya banyak partai belakangan ini dan *money politic* yang dimainkan sejumlah orang yang mengiluskan dan sekaligus mengidentikkan penguasaan pers sebagai sebuah upaya mendapatkan kekuasaan. Soal yang terakhir ini bisa dibaca tulisan Daniel Dhakidae pada *Ilusi Sebuah Kekuasaan*, ISAI, Januari 1997.

<sup>4</sup> Data ini saya kutip dari ucapan Presiden Gus Dur dalam pertemuan tertutup dengan para pemimpin redaksi di Komunitas Utan Kayu pada 30 Juli 2001 lalu.

Di negara antidemokrasi, pers kerap dianggap sebagai musuh. Laporan pers dianggap berpotensi menjatuhkan pemerintah. Malah ada pemeo "mata pena lebih tajam dari pedang" atau ucapan Napoleon Bonaparte yang mengatakan "pena lebih berbahaya ketimbang peluru". Tentu saja itu cuma sebuah ilusi, sekaligus pengagung-agungan pers secara berlebihan.

### **Media Massa Corong Pemerintah?**

Terus terang di jaman Orde Baru, sejak pembredelan 3 media pada 21 Juni 1997 banyak orang di Jakarta menyatakan bahwa media massa kian jadi terompet atau corong pemerintah. Semua teori tentang pers yang bertanggungjawab (*responsible press*) tak berlaku. Misalnya ketentuan untuk membuat liputan berimbang (*cover both side*), pengecekan kembali (*rechecking*) kebenaran pernyataan pejabat, menghadirkan fakta (tanpa penghalusan: eufemisme) dan lain-lain diabaikan begitu saja. Pernyataan pejabat dianggap kebenaran sepenuhnya.<sup>5</sup>

Di balik fungsinya yang positif, pers bisa difungsikan secara negatif. Yaitu dijadikan sebagai alat propaganda oleh kekuasaan untuk menjalankan program mobilisasi rakyat secara massal. Fenomena ini dalam istilah teori pers dikelompokkan sebagai "Pers Soviet Totalitarian" atau "Pers Otoritarian".<sup>6</sup> Contohnya adalah Harian *Pravda* di jaman Uni Soviet yang isinya dikelola dan dipublikasikan sepenuhnya melulu untuk kepentingan Partai Komunis Soviet dan pemerintah.

Contoh yang baik digunakannya media sebagai alat propaganda adalah saat terjadi Perang Malvinas (Inggris menyebutnya sebagai Perang Falkland). Saat itu junta militer yang berkuasa di Argentina meminta agar para pemimpin redaksi di Argentina memberitakan "kemenangan" pasukan Argentina melawan tentara Inggris yang peralatannya lebih canggih beserta resimen Gurkha-nya. Hal ini untuk meningkatkan semangat tempot pasukan Argentina yang mulai kehilangan motivasi dan mendorong para pemuda agar masuk jadi milisi. Padahal kejadian di lapangan sebaliknya, pasukan Argentina babak-belur dihajar tentara Gurkha dan Inggris. Bahkan banyak yang lari begitu melihat Gurkha menggenggam kukri.

Pers juga kerap dijadikan sebagai alat oleh sebuah pemerintah untuk menjatuhkan pemerintah lain dengan menjalankan serangkaian aksi sabotase pencitraan. Contoh yang menarik adalah saat Amerika Serikat berniat menjatuhkan penguasa Uganda, Idi Amin Dada. Agen-agen CIA yang menyusup ke Uganda menyebarkan cerita soal Idi Amin yang menganut aliran kanibalisme dan sejumlah hal lain yang identik dengan gambaran Afrika yang bodoh, hitam, miskin dan terbelakang. Dengan bantuan agen CIA di luar berita itu menyebar. Idi Amin digambarkan sebagai seorang raksasa yang idiot, bekas petinju yang

<sup>5</sup> Contoh ekstrem adalah ketika Kasospol Letjen Syarwan Hamid pada pasca Kerusuhan 27 Juli menyatakan bahwa kakek Ketua PRD, Budiman Soedjatmiko adalah seorang tokoh organisasi terlarang, pernyataan ini dimuat begitu saja tanpa memuat tanggapan keluarga Budiman, apalagi merecheknya. Tokoh yang belakangan dituduh jadi salah satu dalang Penyerbuan Kantor PDI Perjuangan yang berbuntut pada terjadi kerusuhan itu juga menyatakan, bahwa "Saya bisa mengetahui seseorang itu komunis atau bukan cukup dari caranya bernyanyi atau bersiul saja". Semua media mengutip pernyataan ini tanpa disertai sikap kritis. Juga ketika presiden menyatakan, "Indonesia bebas buta huruf", sang wartawan tak pernah merasa bersalah misalnya karena tak merekonfirmasi orang di Lembah Bahliem yang masih pada buta huruf.

<sup>6</sup> Pada Pers Otoritarian media massa dianggap sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, walau pun tidak harus dimiliki pemerintah. Kepemilikan bisa oleh perorangan atau masyarakat melalui paten atau ijin yang diberikan penguasa. Dalam sistem ini media diawasi oleh penguasa lewat kontrol serikat buruh, perijinan dan sensor. Sedangkan dalam sistem Pers Soviet Totalitarian media dikuasai negara dan dikontrol sangat ketat semata-mata dianggap sebagai tangan-tangan negara. Kepemilikannya bisa dikuasai masyarakat, tapi pemerintah sepenuhnya melakukan pengawasan dan membuat sejumlah tindakan politik atau ekonomi. Lihat: Fred S Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm, *Empat Teori Pers*, Penerbit PT Intermedia, Jakarta, 1986.

ke mana-mana hanya mengenakan cawat. Tak bisa baca tulis. Ia suka membunuh lawan-lawan politik dan kemudian memakannya. Saat ada seorang wanita Inggris diberitakan hilang, agen CIA segera beraksi dengan menyebarkan bahwa di lemari es Idi Amin ditemukan sebongkah paha orang yang diperkirakan sebagai milik perempuan warga Inggris yang hilang.

Ada banyak penguasa yang menjalankan aksi propaganda untuk menjaga kelanggengan kekuasaannya. Contoh yang tepat untuk dikemukakan adalah Julius Caesar di jaman Romawi dan Eva Peron.<sup>7</sup> Juga Ferdinand Marcos dari Filipina.<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri, media massa pada awal Orde Baru pernah tercatat jadi alat propaganda untuk menghabisi orang berpandangan berbeda dengan mainstream. Media massa saat itu bekerja sama dengan militer bukan hanya melakukan *trial by the press* berulang-ulang, tapi juga menganiaya dan membunuh berkali-kali (*overkill*) para warga sipil.<sup>9</sup>

Sejumlah wartawan mengatakan bahwa mereka kini telah kehilangan kata-kata-kata dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Mereka tak mampu lagi membedakan antara fakta dan imajinasi. Imajinasi bisa menjadi fakta. Fakta bisa menjadi imajinasi. Semuanya melalui proses penghalusan (eufemisme) dan pengerasan bahasa (deufemisme).<sup>10</sup> Para

<sup>7</sup> Julius Caesar bukan hanya menaklukkan dan mempertahankan bujukannya terhadap para pemimpin propinsi dan pemimpin perang melalui kekuatan militer semata tapi juga menjalankan politik pencitraan sejumlah alat propaganda. Antara lain dengan menggunakan pertunjukan dalam bentuk parade, kemegahan dan upacara-upacara. Walau sesungguhnya bukan ahli bercerita, ia sengaja membesar-besarkan mitos yang menyatakan bahwa dirinya adalah keturunan Venus. Ia juga menggunakan slogan yang hebat-hebat seperti “Veni, Vidi, Vici” (saya datang, saya lihat, saya menang). Ia mencetak wajahnya dalam semua koin yang beredar di wilayah kekaisarannya untuk mengingatkan setiap musuh dan saingannya bahwa dia lah satu-satunya penguasa Romawi. Lebih jauh soal digunakannya media sebagai propaganda bisa dilihat pada James E Combs – Dan Nimmo, *Propaganda Baru*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994. Bandingkan juga dengan sejumlah penguasa yang mencetak gambar dirinya dalam gambar mata uang yang biasanya merupakan pecahan tertinggi yang beredar di negaranya.

<sup>8</sup> Di jaman berjayanya (mendekati masa keruntuhan) Ferdinand Marcos meminta agar departemen pendidikan Filipina menerbitkan komik kepahlawanan dirinya. Ia juga memesan lukisan lelaki berdada gempal mirip tokoh dalam film “Rambo” dengan kepala dirinya. Ia juga memerintahkan sejumlah sejarawan agar mengarah epos-epos kepahlawanan seorang pemuda bernama Ferdinand yang kemudian jatuh hati pada seorang dewi bernama Imelda. Bandingkan dengan perintah Soeharto untuk membuat film “Pengkhianatan G30S/PKI” dan “Janur Kuning” yang menjadi kontroversial karena penuh dengan sejumlah kebohongan.

<sup>9</sup> Hal ini dengan baik sekali diulas dalam disertasi Saskia. Ia katakan bahwa pers Indonesia saat itu bukan hanya melakukan kesalahan jurnalistik, tapi juga melakukan kejahatan. Lihat: Saskia Eleonora Wieringa, *The Politicization of Gender Relation In Indonesia*, Amsterdam, 1995 khusus pada Bab XI. Baca juga: Stanley, “Penggambaran Gerwani Sebagai Kumpulan Pembunuh dan Setan (Fitnah dan Fakta Penghancuran Organisasi Perempuan Terkemuka)”, makalah pada seminar pra-Kiappnas, “Tragedi Nasional 1965” yang diadakan Masyarakat Sejarawan Indonesia pada 8 September 1999 di Gedung Dewan Riset Nasional, Kompleks Puspitex, Serpong.

<sup>10</sup> Hegemoni lewat eufemisme bahasa ini kalau dicermati sesungguhnya lebih dahsyat ketimbang yang pernah diduga orang. Karena eufemisme mampu menghilangkan makna kata hingga orang saling berkomunikasi tanpa pernah mengerti apa yang dimaksud sebenarnya. Sejumlah pengamat bahasa menyatakan dalam eufemisme bahasa yang digunakan pers Indonesia sebenarnya tercermin sebuah praktek kekekerasan struktural secara sistematis. Pakar yang meneliti soal fenomena kekerasan, Johan Galtung, menyatakan bahwa kekerasan berlangsung sedemikian canggih justru ketika korbannya sama sekali tak merasa jadi korban. Aksi kekerasan oleh ektor negara ini bisa tercermin dari sejumlah produksi kata-kata seperti “OTB”, “Ekstrem Kiri” dan “Ekstrem Kanan”, “kelompok Jihad”, “PKI Malam”, “Dalang aksi”, “LSM Bermasalah” dan sebagainya yang justru menunjukkan bagaimana suasana teror dan kekacauan dipelihara untuk melanggengkan ketakutan sekaligus terjaminnya kekuasaan lewat kemungkinan praktek kekerasan untuk mempertahankannya. Barangkali sekadar catatan saja, yang dimaksud dengan hegemoni di sini adalah hal yang disebut oleh Gramsci sebagai pembentukan kesadaran palsu dan pemaksaan disiplin tertentu berdasarkan ideologi kekuasaan di mana semua akibat dan produk yang dihasilkannya seolah-olah tampak sebagai sebuah proses alamiah.

wartawan kebingungan antara menulis cerpen dan menulis berita. Ada puluhan orang mati dalam sebuah kerusuhan hanya bisa ditulis sebagai "sejumlah" orang hilang. Pejabat tinggi negara kita menyatakan bahwa negara dalam keadaan aman tentram, situasi terkendali padahal kebakaran hutan, kerusuhan sosial, gejolak moneter dan malah kelaparan terjadi di sejumlah tempat.

Pers sebagai bagian dari kekuasaan memang bisa memiliki beberapa fungsi. Mulai dari menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi pilihan sikap, memberi status legitimasi, hingga mendefinisikan dan membentuk persepsi atas sebuah realitas.

### **Potensi Media**

Sebuah media memang bisa digunakan jadi alat propaganda oleh sebuah kekuatan politik untuk menyerang dan menjatuhkan lawan, sekaligus mempertahankan kepentingan kelompok politik. Barangkali kita masih ingat bagaimana tabloid *Demokrat* pada awal 2000 memuat gambar Ketua MPR RI Amien Rais sebagai seorang drakula menakutkan, lengkap dengan taring dan tetesan darahnya hingga tabloid *Amanat* perlu melawannya.<sup>11</sup>

Pers memiliki kekuatan antara lain melalui proses pembingkai (*framing*), teknik pengemasan fakta, penggambaran fakta, pemilihan angle, penambahan atau pengurangan foto dan gambar dan lain-lain. Pers berpotensi untuk mengobarkan, atau juga meradam, konflik antar elit politik yang bisa jadi benturan besar di tingkat akar rumput.

Media bisa memperjelas sekaligus mempertajam konflik atau sebaliknya: mengaburkan dan mengeleminirnya. Media bisa merekonstruksi realitas, tapi juga bisa menghadirkan hiperealitas. Secara teoritis, ada tiga posisi media dalam memberitakan konflik, termasuk konflik elit politik. Yaitu sebagai *issue intensifier* dimana media berposisi memunculkan isu atau konflik dan mempertajamnya. Isu yang diangkat media akan memunculkan dan menampakkan dimensi isu secara tajam. Dengan posisi sebagai *intensifier*, media mem-*blow up* realitas yang jadi isu sehingga seluruh dimensi isu menjadi transparan. Lainnya adalah sebagai *conflict diminisher*, yakni media menenggelamkan suatu isu atau konflik. Secara sengaja media meniadakan isu tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan, entah kepentingan ideologis atau pragmatis.

Selain itu, media juga bisa berfungsi jadi pengarah *conflict resolution*, yakni media menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik. Dengan peliputan media, pihak yang terlibat diharapkan memahami sudut pandang pihak lain, mengatasi prasangka dan kecurigaan, serta mengevaluasi ulang sikap dasar yang terbentuk semula.<sup>12</sup>

Wartawan Indonesia selama puluhan tahun terlanjur tak terbiasa dengan pola penyelidikan (*investigation*). Wartawan Indonesia juga sama sekali tak mengenal *provetic journalism* sebagaimana diterapkan para wartawan di negara maju. Dalam meliput konflik elit politik, wartawan lebih banyak mengutip ucapan para tokoh elit politik. Tokoh elit seolah merupakan representasi dari rakyat Indonesia. Asumsi seperti ini membawasa dampak terseretnya rakyat ke wilayah pertikaian elit.

Sejumlah pengamat media menyatakan para wartawan di Indonesia lebih banyak mempraktekkan *talking journalism*, yaitu jurnalisme omongan yang lebih merupakan

---

<sup>11</sup> Yang menarik adalah kenyataan bahwa permodalan tabloid *Amanat* yang jadi corong Partai Amanat Nasional dan tabloid *Demokrat* yang corong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sama-sama dimiliki oleh bos Jawa Pos Grup.

<sup>12</sup> Lihat: Robert Karl Manoff, "The News Values of Peace Journalism" dalam *The Peace Journalism Option*, January 1998.

kutipan atas pernyataan seorang tokoh atau pejabat dan *counter* pakar atas pernyataan tersebut, atau sebaliknya.

Jurnalisme omongan pada hakekatnya adalah sama dengan jurnalisme pembohongan. Pendapat tokoh dipersepsikan seolah-olah sebagai sebuah realitas sosial. Dengan demikian yang muncul sebagai berita sebenarnya adalah kumpulan ucapan pejabat dan tokoh yang lebih merupakan fakta psikologis ketimbang fakta sosiologis.

Jurnalisme omongan yang lebih berorientasi pada pengejaran sumber-sumber pejabat tinggi negara dan militer sebagai dasar legitimasi "fakta kebenaran" berubah menjadi sebuah peresmian desas-desus, rumors dan mungkin juga cerita fiksi.<sup>13</sup> Di jaman Soeharto berkuasa, kalangan pejabat militer dan intelijen kerap melontarkan desas-desus dan tuduhan yang sama sekali mengada-ada. Dalam hal ini, contoh yang paling ekstrem adalah Peristiwa 27 Juli 1996. Saat itu, peristiwa yang sesungguhnya merupakan eksekusi dari penyerbuan aparat keamanan ke kantor PDI Pro Mega mengakibatkan kemarahan rakyat hingga mengamuk dan melakukan perusakan serta pembakaran gedung di sejumlah tempat di Jakarta dengan mudah diubah menjadi tanggungjawab tunggal kelompok Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Dalam Kasus 27 Juli, pers mengutip semua ucapan pejabat tinggi militer dan intelijen sebagai kebenaran. Tuduhan bahwa PRD adalah kelompok komunis yang militan, gerombolan setan gundul,<sup>14</sup> dan kelompok pengacau keamanan dilansir berbagai media tanpa memberikan kesempatan pada PRD, para pendukung dan keluarga aktivis PRD untuk membela diri. Hebatnya, dalam situasi seperti ini beberapa media mengutip ucapan Kasospol ABRI, Letjen TNI Syarwan Hamid, yang mengatakan, "Saya bisa tahu bahwa mereka itu komunis hanya dari mendengar cara mereka bernyanyi atau bersiul."<sup>15</sup>

Media dan wartawan saat itu seperti bungkam saat menerima "pengarahan" dan kebohongan versi tunggal yang dikeluarkan militer, meski di antara wartawan banyak yang jadi saksi bahwa pelaku penyerbuan kantor DPP PDI adalah pasukan militer. Yang agak keterlaluan adalah majalah *Gatra*,<sup>16</sup> yang bukan hanya sekadar menurunkan wawancara

---

<sup>13</sup> Pada awal kekuasaan Orde Baru, Soeharto juga menggunakan dua media yang dikuasai tentara yaitu Angkatan Bersenjata (*The Army*) dan Berita Yudha (*War News*) untuk mengobarkan propaganda semangat anti-komunis dengan cara menyebarkan kebohongan tentang kekejaman dan penyiksaan yang dilakukan organ perempuan yang jadi *onderbouw* Partai Komunis Indonesia (PKI), Gerwani ketika membunuh "Tujuh Jendral Revolusi" satu demi satu. Cerita tentang tarian telanjang "harum bunga", pesta seks (*orgy*), penyiletan penis para jendral (*sado-masochist*) merupakan sebuah cara untuk menciptakan kebencian rakyat terhadap kelompok ini, yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan kemarahan "rakyat" yang berakibat (jadi alasan) terjadinya pembunuhan massal terhadap jutaan orang sepanjang tahun 1965-1968. Lihat: Stanley, "Penggamboran Gerwani Sebagai Kumpulan Pembunuh dan Setan: Fitnah dan Fakta Penghancuran Organisasi Perempuan Terkemuka", paper yang disampaikan pada seminar Pra-Kipnas "Memandang Tragedi Nasional 1965 Secara Jernih" yang diselenggarakan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) di Kampus Puspittek Serpong pada 8 September 1999.

<sup>14</sup> Sebutan ini dilansir Soeharto kepada para wartawan dalam temu wicara pada 24 Juni 1996 di Jakarta saat menjelaskan tentang aktivitas "orang-orang PRD" yang memberikan dukungan kepada pendukung Megawati di Kantor PDI di Jl. Diponegoro, Jakarta.

<sup>15</sup> Lihat: *Terbit dan Republika*, 1 Agustus 2000.

<sup>16</sup> Majalah ini dikelola Herry Komar dkk, mantan awak *Tempo* yang dibredel pada 21 Juni 1994. Kelompok ini dianggap para wartawan muda yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berkhianat, baik dari sisi komitmen maupun ideologis. Sejumlah kolumnis, dipimpin Dr Arief Budiman, pernah melancarkan gerakan boikot menulis dan membaca majalah *Gatra*. Pada Peristiwa 27 Juli, majalah ini menurunkan sejumlah tulisan yang bukan hanya menyudutkan tapi juga menyerang PRD dan Romo Sandyawan Sumardi SJ yang membantu menyelamatkan aktivis PRD. Seluruh bahan yang diturunkan sebagai liputan utama yang menyerang PRD bertumpu pada hasil interogasi (berdasar siksaan) aparat militer. Sejumlah wartawan mengecam model jurnalisme yang dipraktekkan majalah ini dan menyebutnya sebagai "jurnalisme intel".

tapi menggunakan akses dan kedekatan dengan kelompok militer untuk membuka semua file pemeriksaan dan interogasi militer yang mempersepsikan PRD sebagai kelompok komunis yang berbahaya.<sup>17</sup>

Pola kerja dan liputan berdasar pada omongan ini membuat *news paper* diplesetkan sebagai *views paper*. Artinya, media lebih memberitakan tentang persepsi atau pikiran ketimbang menghadirkan kenyataan sosiologis. Sebuah berita direkonstruksi berdasar ucapan dan pikiran para narasumber.

Kaidah pers "*big name big news, no name no news*" dalam paradigma wacana media di Indonesia, khususnya yang menyangkut pejabat, adalah mesin produksi berbagai anti-realitas. Contoh ekstrem yang bisa dikemukakan di sini adalah pada 1970-an saat Presiden Soeharto berpidato menyatakan bahwa Indonesia telah bebas buta huruf, pers keesokan harinya memuatnya pernyataan ini sebagai *headline* dan tak pernah melakukan konfirmasi pada jutaan rakyat yang masih buta huruf.<sup>18</sup> Dengan bantuan media, ucapan presiden yang tadinya baru bertaraf "pernyataan" diubah menjadi "kenyataan".<sup>19</sup> Upaya mengubah paradigma pernyataan-kenyataan ini didukung dengan diwajibkannya setiap desa membuat slogan "Daerah Kami Bebas-3B".<sup>20</sup>

Dengan adanya kebiasaan pejabat atau tokoh untuk menutupi fakta sebenarnya, maka pers terbiasa mengutip kebohongan. Hal ini terlanjur jadi sesuat yang lumrah. Apalagi ada kewajiban dalam pers untuk menyajikan liputan secara berimbang (*cover both side*). Di jaman Orde Baru, liputan penyelidikan dan pengumpulan data di lapangan bisa dimentahkan dengan bantahan dari pejabat yang apabila diturunkan akan mengundang risiko munculnya teguran dari sejumlah instansi yang berwenang.<sup>21</sup>

Dalam hal konflik elit, media bukan hanya mempraktekkan jurnalisme omongan tapi juga dengan fasihnya mempraktekkan jurnalisme perang, sebuah hal yang kini tengah mendapat sangat kritikan pedas di kalangan jurnalis (lihat **Tabel 1**).

## Kekerasan Media

Potensi munculnya kekerasan oleh media sangat besar. Selain pemelintiran fakta melalui praktek jurnalisme omongan, pembanjiran kata-kata dari sumber yang tak bisa

Untuk mengerti pola kerja dan pemetaan intelijen militer Indonesia terhadap kelompok kritis dalam masyarakat bisa dilihat dari *Lampiran C. Gambaran Militer Terhadap Ancaman Keamanan Juni 1998*.

<sup>17</sup> Dari sejumlah penyidikan yang belakangan dilakukan Polri, terbukti adanya campur tangan langsung dari Kasospol Letjen TNI Syarwan Hamid, Pangab Jendral TNI Feisal Tanjung dan bahkan Presiden Soeharto serta petinggi militer dalam peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI 27 Juli 1996.

<sup>18</sup> Hal seperti ini terjadi berkali-kali selama Orde Baru, antara lain ketika Soeharto menerima penghargaan dari Badan Pangan Sedunia atas "keberhasilannya" memimpin bangsa Indonesia keluar dari ketergantungan import beras dan berhasil sukses berswasembada beras. Terakhir ketika Soeharto terkena serangan stroke pada akhir 1997.

<sup>19</sup> Dalam kajian teoritis, pencampuradukan dan perekayaan antara kepalsuan dan realitas ini dikenal sebagai *simulacra* atau hiper-realitas. Dan bahkan ada kecenderungan media di jaman Orde Baru bukan hanya menciptakan *simulacra* melalui ucapan pejabat, tapi juga telah menghadirkan wacana yang berkaitan dengan penciptaan pengetahuan palsu dan kebenaran semu di masyarakat yang lebih dikenal sebagai *pseudosophy*.

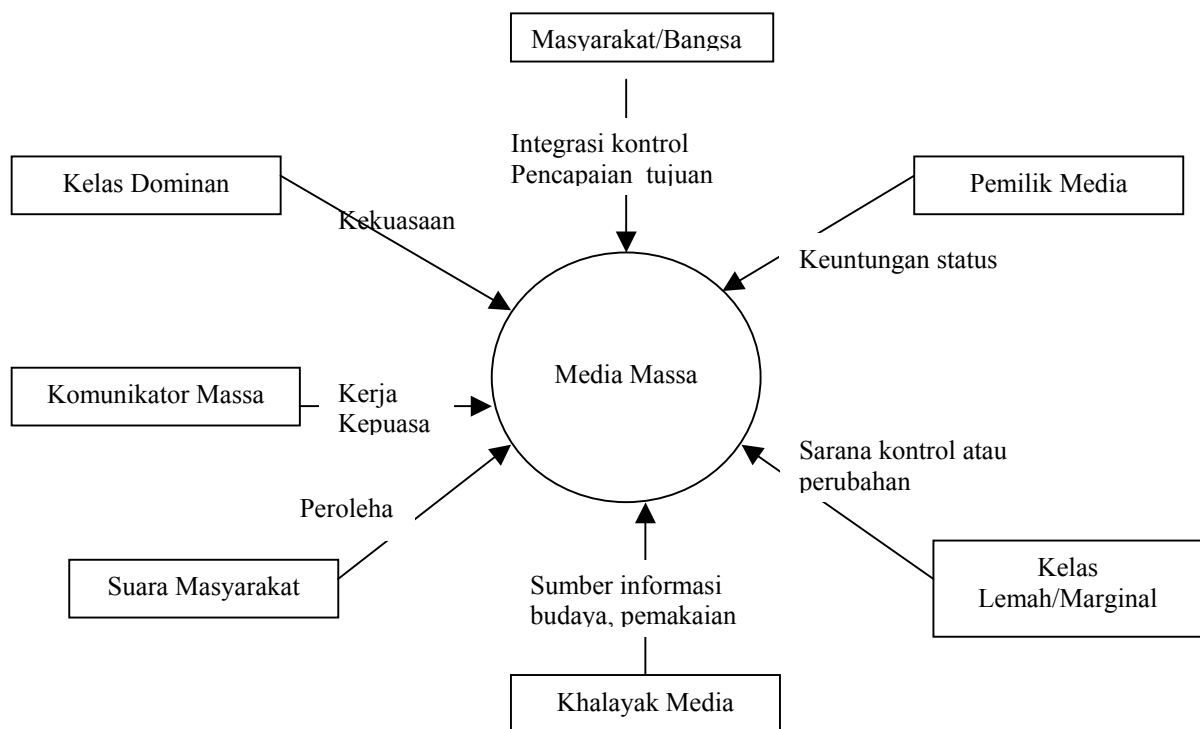
<sup>20</sup> Kapanjangan dari "buta aksara, buta huruf, buta angka", namun oleh masyarakat diplesetkan menjadi "buta ijo, buta terong dan buta cakil".

<sup>21</sup> Para era Orde Baru, redaksi media massa mendapat kontrol yang sangat kuat sehingga muncul sinyalemen bahwa dalam model pers Indonesia yang kondang disebut sebagai pers Pancasila, dimana sesungguhnya pemimpin redaksi adalah bagian dari "otak" Departemen Penerangan dan Mabes ABRI yang berfungsi sebagai pengatur kebijakan redaksional yang sesungguhnya.

dipertanggungjawabkan kebenarannya kecuali hanya bersandar pada lebitisasi jabatan; sejumlah media terbukti melakukan praktek kekerasan lainnya. Antara lain dengan menghadirkan *headline* serta judul pemberitaan yang berbeda (*misleading*) dengan isi pemberitaan dan kenyataan sebenarnya. Sejumlah media juga melakukan dramatisasi serta pengerasan fakta untuk mengobarkan rasa benci dan permusuhan. Pengutipan kata-kata dilakukan justru dengan memilih kata-kata narasumber yang paling keras dan paling kontroversial yang bisa menimbulkan konflik terbuka.

Kekerasan dengan cara yang berbeda dilakukan media dengan cara yang berbeda, yaitu dengan memperhalus kata-kata (eufemisme), bahasa dan fakta. Cara yang selain menimbulkan efek terhadap munculnya sejumlah kata-kata bermakna ganda ini juga menyebabkan masyarakat kehilangan kemampuan membaca fakta.<sup>22</sup>

Unsur subyektifitas (personal) pengelola media, ketakberesan pengambilan keputusan dalam redaksi, masuknya vested interest pimpinan media dan vested permodalan juga merupakan salah satu dari banyak penyebab tidak obyektifnya pemberitaan sebuah media. (Lihat **Bagan I**. Vested Interest Masyarakat Terhadap Media Massa)



**Bagan 1. Fungsi dan Kepentingan Media**

Hak jawab yang ditonjolkan media sebagai hak pembaca yang merasa dirugikan kerap tak efektif. Banyak pihak merasa tak ada gunanya menyampaikan hak jawab atau mengirim sanggahan lewat surat pembaca, karena redaksi tak akan memuatnya. Atau kalau memuat, biasanya waktunya lama, setelah "momentum perdebatan" lewat. Kerap

<sup>22</sup> Contohnya kekerasan dan aksi penculikan yang dilakukan korps Baret Merah terhadap sejumlah aktivis pada 1997 nyaris tak memiliki makna apa-apa dengan praktek militerisme dan penyalahgunaan kewenangan intelijen ala Orde Baru tatkala para pelakunya disebut sebagai "oknum". Seluruh proses hukum yang dilakukan terhadap para penculik yang tergabung dalam "Tim Mawar" hanya dilihat sebagai bagian dari eksekusi atas kesalahan prosedural.

juga permintaan maaf, pembetulan kesalahan tak bermakna apa-apa karena redaksi kembali mengulang menurunkan berita seperti kesalahan yang pertama kali dibuatnya.

Selain kekerasan tekstual, media juga memiliki potensi kekerasan modal. Seperti diketahui umum, ada banyak pimpinan media yang berhasil membawa medianya sukses sebagai sebuah bisnis. Ada pula wartawan yang berkat medianya bisa menduduki sejumlah jabatan strategis dalam pemerintahan. Sejumlah wartawan juga berhasil masuk dalam kehidupan kalangan jet set. Mereka ini tentu saja memiliki kepentingan untuk mempertahankan apa yang telah mereka raih.

Sejumlah pimpinan media ada yang melihat media yang dipimpinnya tak lebih dari sebuah komoditi ekonomi. Dengan demikian, bukan tak mungkin pelunakan dan pengerasan fakta bukan tak mungkin lebih merupakan strategi pemilik media untuk mengamankan aset atau menaikkan tiras media yang dikelolanya.<sup>23</sup>

### **Mengembalikan Peran Media**

Apa peran pers sebenarnya? Di Indonesia, kerap kali pers dibingkai dalam bahasa jargon. Ada banyak sebutan terhadap pers. Mulai dari "pers perjuangan", "pers pembangunan", "pers yang bebas tapi bertanggungjawab", "pers Pancasila". Orang kerap lupa pada fungsi sebenarnya bahwa pers tak lebih dan tak kurang adalah pers, sebuah media yang punya fungsi sosial. Demikian pula wartawan tak lebih adalah wartawan, seseorang yang tugasnya meliput sebuah kejadian. Tak lebih tak kurang.

Dengan demikian adalah terlalu berlebihan sebutan atau kiasan yang menggambarkan wartawan sebagai seekor "binatang" yang menggigit, apalagi menghisap darah, seperti yang tergambar lewat penyebutan "nyamuk pers" atau "anjing penjaga" (*watchdog*). Sama berlebihannya dengan menggambarkan pers sebagai sebuah pilar demokrasi.

Fungsi utama yang dijalankan media massa sebetulnya berperan sebagai saluran mediasi yang mencakup juga tugas "menghubungkan", "menunjukkan arah" dan "mengintrepretasikan" serta tentu saja "mengoreksi". Pengakuan pers sebagai bagian dari sistem pemerintahan memberikan kemungkinan pada pers untuk bertindak sebagai seorang inspektur yang selain "mengintrepretasikan" dan "mengoreksi" juga "mengkritik" dan meminta sejumlah "pembenahan".

Pakar komunikasi dari Universitas Amsterdam membagi fungsi media massa secara sistematis menjadi lima bagian.<sup>24</sup> Antara lain media massa menjalankan fungsi "informasi". Yaitu menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia; menunjukkan hubungan kekuasaan dan memudahkan inovasi, adaptasi serta kemajuan.

Media massa juga menjalankan fungsi "korelasi". Yaitu menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi; menunjang otoritas dan norma yang mapan; melakukan sosialisasi, mengkoordinasikan beberapa kegiatan; membentuk kesepakatan dan menentukan urutan prioritas serta memberikan status relatif.

Selain itu juga menjalankan fungsi "kesinambungan". Yaitu mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus (subkultur) serta perkembangan budaya baru; dan meningkatkan serta melestarikan nilai-nilai.

Fungsi yang lain adalah "hiburan". Yaitu menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana relaksasi; meredakan ketegangan sosial.

<sup>23</sup> Kritik ini banyak dilemparkan pengamat pada Dahlan Iskan dengan Grup *Jawa Pos*-nya (JPNN) yang mengembangkan jurnalisme "sensasional". Kita juga bisa melihat bagaimana *Suara Maluku* dan *Ambon Ekspres* saling bertikai membela "umat"-nya ternyata dimiliki oleh satu orang, yaitu Dahlan Iskan.

<sup>24</sup> Secara lebih detil bisa dibaca sendiri pada karya Profesor Denis yang telah diterjemahkan. Lihat: Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994 (Edisi ke Dua).

Fungsi terakhir media massa adalah "mobilisasi". Yaitu mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan dan kadang kala juga dalam bidang agama.

Pers Indonesia kini saatnya melakukan aksi moratorium, berhenti mengutip kata-kata tokoh dan pejabat yang saling menyakiti satu sama lain. Pers harus bisa berperan untuk menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam upaya penyelesaian dan penanganan konflik serta korban-korban konflik yang terus berjatuh di banyak tempat.

Fungsi media saat ini harus dikembalikan ke asalnya, yaitu lebih menyoroti persoalan kemasyarakatan ketimbang konflik para elit yang tak bermutu. Gagasan dan paradigma tentang pers advokasi (lihat Tabel 2) yang berpegang pada *vox populi vox dei* barangkali bisa dijadikan sebagai model jurnalisme yang perlu dikembangkan oleh industri media kita dewasa ini. Khususnya ketiga Indonesia menjadi salah satu negara miskin di kawasan Asia Tenggara dan negara dengan pengungsi terbesar di dunia saat ini.

### **Ide Jurnalisme Damai Sebagai Alternatif**

Ide tentang jurnalisme damai sebetulnya berangkat dari kemucakan wartawan, akademisi dan masyarakat yang melihat bagaimana kelompok masyarakat menikmati liputan peperangan sebagai sebuah hiburan. Kemucakan ini muncul saat terjadi Amerika melakukan "Operasi Badai Gurun" dimana CNN membuat siaran langsung dari detik ke detik.

Saat itu semua media menokohkan Amerika sebagai polisi dunia dan memojokkan Saddam Husein sebagai "cecunguk". Seluruh kampanye negatif dijatuhkan atas diri Saddam yang dianggap sebagai penyebab dari perang tersebut. Padahal yang terjadi adalah ketidak-seimbangan posisi perang antara Irak melawan keroyokan pihak. Dalam sebuah kejadian Perang Teluk, serangan udara pihak Sekutu menjatuhkan sebuah bom dan membinasakan puluhan warga sipil Irak. Pihak Sekutu melancarkan tuduhan bahwa pihaknya hanya menyerang sasaran militer dan tak pernah menyasar penduduk sipil. Sekutu menuduh Saddam sengaja menempatkan warga sipil Irak dalam bunker militer sebagai tameng dalam menghadapi ancaman Sekutu yang ingin melumpuhkan fasilitas persenjataan Irak. Namun pihak Irak menolak tuduhan ini dan menyatakan bahwa yang dibom sekutu tak lain adalah tempat perlindungan yang dirancang pemerintah Irak bagi warga sipil. Mana yang benar?

Sekelompok orang yang galau melihat hal tersebut memunculkan upaya untuk melakukan *rethinking* atas nilai-nilai jurnalisme yang melihat konflik sebagai sebuah hal yang paling memiliki nilai berita. Upaya para wartawan senior tersebut kian dipicu oleh serangkaian ceramah pakar perdamaian, Profesor Dr Johan Galtung dalam sebuah kuliah sekolah musim panas di Taplow Court, Buckinghamshire, Inggris pada Agustus 1997.<sup>25</sup> Dalam perkuliahan yang dihadiri para wartawan, ilmuwan dan mahasiswa media dari Eropa, Afrika, Asia dan Amerika tersebut berhasil dirumuskan antara lain perbedaan antara "ideologi" jurnalisme perang dan jurnalisme damai.

**Tabel 1. Perbedaan Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang<sup>26</sup>**

Jurnalisme Damai	Jurnalisme Perang
------------------	-------------------

<sup>25</sup> Selain Profesor Johan Galtung, yang terlibat sebagai tenaga pengajar dari perkuliahan musim panas ini adalah Profesor Rune Ottosen, Profesor Wilhelm Kempf (Universitas Konstanz), Marty Gregory (dokumentator film), Par Younge (wakil editor *Here and Now*), Nick Pollard (kepala bagian pemberitaan *Sky TV*) Maggie O'Kane (wartawan *Guardian and C4*), Larry Hollingworth (UNHCR), Mick Hume (editor *LM Magazine*), Paddy Crean (Hon Sec), Sebastian Cody (editor *After Dark C4*).

<sup>26</sup> Bahan ini diadaptasi dari lampiran pada *The Peace Journalism Option, Transcend Peace and Development Network*, 1998, hal. 44.

<p><b>Penentuan Angle dan Fokus</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada proses terjadinya konflik: pihak-pihak yang terlibat, penyebab pertikaian, permasalahan yang menyertai, berorientasi pada opsi "memang-menang"</li> <li>2. Ruang dan waktu yang terbuka; sebab-akibat dalam perspektif sejarah</li> <li>3. Memberitakan konflik apa adanya</li> <li>4. Memberi ruang pada semua suara/versi; menampilkan empati dan pengertian</li> <li>5. Melihat konflik atau perang sebagai sebuah masalah, fokus pada hikmah konflik</li> <li>6. Melihat aspek humanisasi di semua sisi/pihak</li> <li>7. Pro-aktif: pencegahan sebelum konflik/perang terjadi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada arena konflik: dua kubu bertikai, hanya satu tujuan (kemenangan), situasi peperangan, orientasi "memang-kalah"</li> <li>2. Ruang dan waktutertutup; sebab-akibat terbatas arena konflik, mencari siapa yang menyerang duluan</li> <li>3. Ada fakta yang sengaja disembunyikan</li> <li>4. Berita memilahkan "kita-mereka", nuansa propaganda, suara dari dan untuk "kita"</li> <li>5. Melihat "mereka" sebagai masalah, fokus pada siapa yang menang perang</li> <li>6. Dehumanisasi di pihak "mereka", humanisasi di pihak "kita"</li> <li>7. Reaktif: Menunggu terjadi konflik, baru buat reportase</li> </ol>
<p><b>Orientasi Liputan</b></p>	<p>Ketidak-benaran di kedua-belah pihak, membongkar "cover up"</p>	<p>Hanya mengungkap ketidak-benaran "mereka" dan menutup-nutupi ketidak-benaran "kita"</p>
<p><b>Cara Pandang Terhadap Akhir Konflik</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada penderitaan semua: perempuan, anak-anak, orang tua; memberi suara pada korban</li> <li>2. Menyebut nama pelaku kejahatan di kedua-belah pihak</li> <li>3. Fokus pada para penggiat perdamaian di tingkat akar rumput</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada penderitaan "kita"; memberi suara hanya pada panglima perang</li> <li>2. Menyebut nama pelaku kejahatan di pihak "mereka"</li> <li>3. Fokus pada penggiat perdamaian di tingkat elit</li> </ol>
<p><b>Pandangan Terhadap "Akhir" Konflik</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdamaian = anti-kekerasan + hikmah</li> <li>2. Mengangkat inisiatif perdamaian dan mencegah perang lanjutan</li> <li>3. Fokus pada struktur dan budaya masyarakat yang damai</li> <li>4. Usai konflik: resolusi, rekonstruksi dan rekonsiliasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdamaian = kemenangan + gencatan senjata</li> <li>2. Menyembunyikan inisiatif perdamaian, sebelum kemenangan diraih</li> <li>3. Fokus pada pakta dan institusi masyarakat yang terkendali</li> <li>4. Usai konflik: siap bertempur lagi bila "luka lama kambuh"</li> </ol>

Namun harus dimengerti bahwa Jurnalisme Perdamaian lahir di negeri Barat (negara maju) dan lebih merupakan inisiatif kelompok masyarakat, keprihatinan wartawan serta penggiat perdamaian dalam melihat dominasi Barat atas negeri-negeri non-Barat.

Di banyak negeri berkembang (baca: Negara Selatan), konflik kerap muncul akibat ketidakadilan dalam banyak hal. Mulai ekonomi, politik, sosial, kebudayaan hingga lebih akibat adanya dominasi kelas elit. Acapkali konflik merupakan bagian dari upaya *bargaining position* yang tak terakomodasi oleh sistem. Meliput persoalan ini dengan kacamata "jurnalisme perdamaian" semata tentu saja tak cocok untuk sepenuhnya diterapkan. Jurnalis harus juga menyodorkan fakta dan bukti-bukti yang berguna bagi perbaikan sistemik. Jurnalisme damai hanya bisa dilakukan bila ada upaya penguasa untuk menerapkan keadilan. Untuk itu barangkali jurnalisme perdamaian sebagai upaya penghentian aksi kekerasan dan eksekusinya perlu dilengkapi perlu paradigma jurnalisme advokasi.

Jurnalisme advokasi sengaja dikembangkan kalangan aktivis dan wartawan di Indonesia sebagai upaya untuk meninjau ulang kaidah-kaidah umum dalam ilmu jurnalistik yang lebih mengutamakan unsur keanehan, sensasi, konflik dan pertikaian sebagai sebuah isu yang seksi. Jurnalisme model ini barangkali cocok untuk diterapkan oleh media terbitan ornop di Indonesia.

Ide jurnalisme advokasi dilatarbelakangi keadaan pers yang menyedihkan di masa Orde Baru. Antara lain terperangkapnya pers dalam paradigma "slogan" Pers Pancasila" yang dikembangkan Ali Murtopo dan Harmoko. Juga terjerumusny pers pada jurnalisme pejabat (jurnalisme omongan) dimana pejabat yang karena nama besarnya dan legalitas jabatannya dianggap mewakili klaim atas seluruh kejadian dan kebenaran. Selain itu juga tersingkirnya para korban pembangunan dari pemberitaan nasional akibat "politik pembinaan pers" oleh sejumlah lembaga seperti Departemen Penerangan, Direktorat Jendral PPG, Ditsospol dan militer serta "ketakutan" pemilik modal (media) akan regulasi dan represi eksternal.

**Tabel 2. Perbedaan Jurnalisme "Umum" dengan Jurnalisme Advokasi**

	<b>Jurnalisme Umum</b>	<b>Jurnalisme Advokasi</b>
--	------------------------	----------------------------

<b>Penitikberatan Berita</b>	Unsur sensasional, kontroversial, permasalahan "banyak" orang yang sebetulnya lebih diwakili kaum elitis	Keseriusan permasalahan, tingkat kebrutalan pelanggaran HAM, ancaman terhadap kelompok minoritas dan <i>indigienus people</i>
<b>Model Pemberitaan</b>	Menekankan pada ketentuan "liputan berimbang", kehati-hatian (terutama terhadap unsur SARA) dan konfirmasi dengan aparat yang berwenang	Menekankan pada unsur "kebenaran" yang didapat berdasar hasil laporan investigatif. Dalam hal ini konfirmasi dari sumber yang "jelas akan menyangkal" bisa diletakkan sebagai prioritas terakhir. Lebih bertumpu pada pendekatan <i>provetic</i>
<b>Isu Yang Diangkat</b>	Masalah nasional yang genting, perang di tingkat internasional, wabah penyakit, ulah celebrities, hingat bingar dunia hiburan, keanehan warga/pejabat daerah dan lain-lain	Permasalahan orang kecil, pelanggaran HAM, terpinggirkannya hak sekelompok masyarakat, keberanian dan perlawanan rakyat kecil
<b>Narasumber Utama</b>	Tokoh yang punya nama besar, tokoh yang mengaku punya massa, pejabat, selebritis	Para "korban", rakyat kecil, kelompok minoritas, saksi mata, aktivis ornop dan kaum akademisi kritis
<b>Prioritas Kerja</b>	Membuat tulisan menjadi "berbicara tentang banyak hal" seperti layaknya sebuah videoklip	Memunculkan masalah pelanggaran negara terhadap "masyarakat" yang tak mampu bersuara ( <i>voiceless</i> )
<b>Asas Legalitas</b>	Menekankan pada tampilan formal wartawan dengan menunjukkan identitas seperti kartu pers, surat tugas, kekuatan lobi dsb	Bila perlu menyamar seperti "intel" dan bahkan menyamarkan narasumber yang rawan terhadap ancaman represi dan penghilangan secara paksa
<b>Harapan Pasca Pemuatan</b>	Masyarakat terhibur, tahu permasalahan mutakhir dan bisa mengikuti trend isu atau gosip (mode, kesehatan, iptek dll) yang sedang jadi pemberitaan	Muncul perdebatan dan polemik masyarakat yang pada akhirnya akan berujung pada penguatan hak-hak rakyat, pemerintah bisa memperbaiki kebijakan dsb

Belakangan pengertian keberimbangan liputan juga mengalami proses reinterpretasi. Para jurnalis yang berkali-kali meliput pertikaian di wilayah Israel dan Afrika Selatan mencoba mendefinisikan ulang arti keberimbangan sebagai berikut:

**Tabel 3. Perbandingan Konsep Seimbang Antara yang "Lama" dan "Baru"**

	"Lama"	"Baru"
<b>Aturan</b>	Watchdog Komentator Meliput isu secara independen Pengamat (observer)	Enabler Komunikator Independen – interdependen "Dalam perahu"
<b>Gaya/story</b>	Debat Perbedaan Polemik	Dialog Pijakan bersama dan perbedaan Diskusai
<b>Pendekatan Jurnalisme</b>	Melihat simplisitas Reaktif terhadap even kekerasan  "I am objective" (quantity)	Mengeksplor kompleksitas Mencoba mengerti konflik yang tak tercover "I am fair" (quality, yang dicerminkan dari cerita dan persepsi dua sisi)
<b>Pendekatan Pembaca/ Pendengar/ Pemirsa</b>	Kematian, kehancuran  Meningkatkan sirkulasi Agenda setting ruang redaksi Pemimpin/pakar paling tahu  Hak untuk tahu	Partisipasi masyarakat dan mencari solusi Membangun audiens ( <i>readership</i> ) Publik menentukan setting agenda Masyarakat perlu diminta pendapatnya Hak untuk berpartisipasi

Sumber: Jake Lynch, *Reporting The World*, 2002.

### **Jurnalisme Patriotis: Sebuah Kemunduran?!**

Jurnalisme modern dipraktekkan di atas prinsip-prinsip profesionalitas. Untuk itulah dibuat standar dan aturan kerja yang baku. Termasuk dibentuk organisasi profesi dan upaya penegakan kode etik profesi. Bahkan, seperti halnya profesi lain yang memiliki hak tolak (pastur, dokter dan pengacara), jurnalis memiliki hak istimewa lain yang membuat bisa diterima di pihak manapun yang sedang berperang/bertikai.

Pekerjaan jurnalis yang hanya memegang kamera dan alat tulis, tek boleh dikaitkai dengan nasionalisme. Sekali seorang jurnalis terlibat dalam pekerjaan pembelaan terhadap salah satu pihak/kelompok, maka sesungguhnya ia telah menjalankan aksi propaganda.

Ide jurnalisme patriotis yang lebih banyak diilhami oleh langkah pemerintah AS dalam menumpas terorisme yang dapat dukungan wartawan AS sesungguhnya masih merupakan polemik awal di kalangan pakar komunikasi dan jurnalis. Malah dalam sejumlah kasus media besar seperti halnya CNN yang mempraktekan jurnalisme patriotis justru kehilangan pamor dan dipertanyakan kredibilitasnya.<sup>27</sup> Dalam hal ini LKBN Antara juga pernah dipertanyakan kredibilitasnya, khususnya saat membuat menurunkan liputan pasca jajak pendapat di Timor Timur.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ada yang berpendapat bahwa perang membuat banyak kehilangan nalarnya. Pada saat penyerangan menara kembar WTC di New York, CNN melakukan manipulasi dengan menayangkan gambar orang di kawasan Timur Tengah seolah-olah tengah bersorak-sorai menyambut keruntuhan menara kembar tersebut. setyelah diusut, ternyata gambar tersebut adalah sebuah *stock shoot* dari adegan lama.

<sup>28</sup> Salah satu liputan yang paling kontroversial adalah berita soal pembakaran seorang milisi anggota Mahidi (Mati Hidup Demi Indonesia) oleh pasukan Interfet di kawasan pinggiran Pantai Dili. Berita yang bersumber pada pengakuan salah seorang komandan Mahidi yang ternyata hanya isapan jempol belaka ini dikutip oleh

Kalangan jurnalis juga mengecam gaya jurnalisme Amerika yang mengikuti gaya kobyai Presiden George W. Bush. Banyak dari mereka adalah para jurnalis Amerika sendiri. Malah kini politisi Partai Demokrat menyiapkan gugatan atas kebohongan publik yang dilakukan Presiden Bush yaitu tentang adanya senjata pemusnah massal di Irak. Sebuah pernyataan politik yang kemudian dijadikan alasan pembenar bagi serangan ke Irak.

Model *embedded journalism* dan pelatihan militer para jurnalis yang tak lain adalah bagian dari upaya memraktekkan jurnalisme patriotis. Model jurnalisme seperti ini pernah menimbulkan banyak masalah di masa lalu. Salah satunya, kita bisa melihat pengalaman Perang Vietnam.

Seharusnya pers diberlakukan dan diberi kesempatan bekerja sebagaimana seharusnya. Jurnalis yang bekerja meliput tak seharusnya dihambat, karena jurnalis pada dasarnya bekerja di lapangan seperti petugas Palang Merah: profesional sesuai standar profesi, non-partisan dan independen. Dengan memberi uniform, pelatihan khusus, perlengkapan militer dan lain-lain akan menjadikan seorang jurnalis tak memiliki netralitas sebagaimana disyaratkan dalam nilai profesionalitas. Upaya mengontrol media yang dilakukan di kawasan Aceh maupun mendesain pemberitaan mengenai Aceh sedemikian rupa bukan tak mungkin di kemudian hari akan menimbulkan ekses yang merugikan pihak TNI sendiri. Misalnya tuduhan pelanggaran HAM berat oleh peradilan internasional, atau embargo/boikot kebutuhan peralatan militer TNI.

Semestinya media dan jurnalis bisa menjadi bagian dari sistem peringatan dini bagi TNI agar dalam operasinya tak melakukan penyimpangan. Bila ini terlaksana, akan terjadi sinergi yang sesungguhnya tanpa perlu ada kesangsian dan pertanyaan tentang nilai-nilai patriotisme dari satu pihak atas pihak yang lain.\*\*\*